

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa: Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dalam menyusun standar, pelaporan keuangan dan penyelenggara akuntansi. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Diharapkan seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan sesuai sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang andal dan lengkap kepada berbagai pihak. Setelah ditetapkannya SAP berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki pedoman dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 12 PSAP yaitu :

1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap
8. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. SAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

2.1.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada umumnya dijelaskan dalam perspektif yang berbeda-beda tapi pada dasarnya agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis itu dan siap menghadapi peluang dan tantangan diluar institusi maupun di waktu mendatang setiap pelaku bisnis yang baik dari masa ke masa pasti memiliki kesadaran akan pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal biasanya akan diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi/bisnis perusahaan.

Menurut Hery (2013:159) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Diharapkan kegiatan dapat dipantau dan berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan setelah adanya pengendalian internal di setiap pemerintah. Sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PERMENDAGRI no 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari, identifikasi risiko dan analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang paling penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh setiap organisasi, perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam menjalankan fungsi akuntansi yang telah ditetapkan pada organisasi, instansi atau perusahaan terkait.

Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Nawawi dalam Yani (2012: 1)

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal nonmateril dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011:244) yaitu:

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi maka seseorang tidak akan dapat mencapai kinerja tertinggi dalam pekerjaannya.

Menurut Wibowo (2012:324) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau tugasnya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien merupakan kapasitas dari kompetensi sumber daya manusia. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat, menjadi tepat waktu dan tidak terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan dengan baik.

Perangkat daerah harus memiliki pengalaman di bidang keuangan dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan hal terpenting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dalam menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang di buat, dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Fahmi (2013:2) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2): Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan. Tuntutan dilaksankannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Agar dapat memenuhi tujuannya karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang diinginkan.

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari

laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
- d) Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan aturan Keuangan.
- g) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah (2014) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

2.1.7 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi (*unternational equity*) (SAP No. 24 Tahun 2005).

Untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal utama yang digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan yaitu laporan keuangan. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) Keseimbangan Antar generasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal berbeda yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain, Komarudin (2010), Fikri (2013) , Dagong (2013) Wati dkk (2014) dan Nurillah (2014).

Komarudin (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil penelitian ini menunjukkan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fikri (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar

Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang. kedua secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

Dagong (2013) melakukan penelitian Tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Dppkad Kota Gorontalo) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo sebesar 44,4%.

Wati dkk, (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Nurillah (2014) menunjukkan hubungan Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu yang di atas tercantum pada tabel 2.1

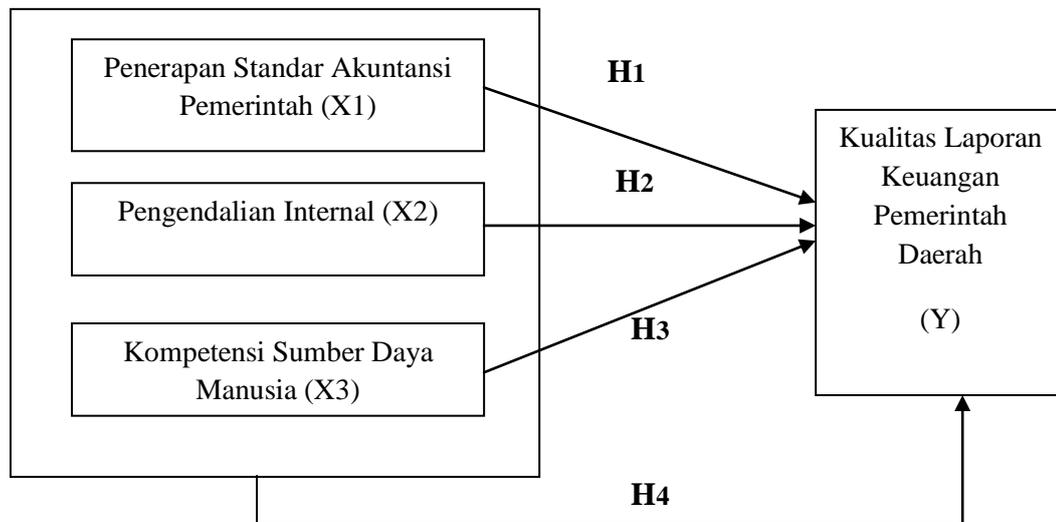
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	Yusup Komarudin (2010)	Independen : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Dzulfikar Ahli Fikri (2013)	Independen : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.
3.	Stevani I. Dagong (2013)	Independen : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap)	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh

		Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Dppkad Kota Gorontalo)	positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo.
4.	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni kadek Sinarwati (2014)	Independen : Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kompetensi sdm, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daeah
5.	As syifa Nurillah (2014)	Independen : hubungan Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.2



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berikut ini uraian konsep variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini pada gambar 1:

- a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengikuti prinsip prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas. Penelitian Wati dkk (2014) menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

- b. Pengaruh Pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem

pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan
- H2 : Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan
- H4 : Penerapan SAP, Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan